

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Athiqah Nur Alami. (2016). Politik luar negeri dan isu-isu keamanan non – tradisional. *Yogyakarta : Calpulis.*
- Hadiwinata, B.S. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional. *Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.*
- Hennida, Citra. (2015). Rezim dan Organisasi Internasional. Malang: Intras Publishing.
- Hermawan, Yulius P. (2007). Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (n.d.). *Data Wilayah Kelautan Indonesia.*
- Lamy, Steven L. 2008. Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism. Dalam Baylish, John and Smith, Steve, ed. *The Globalization of World Politics and Introduction to International Relations.* eds: New York: Oxford University Press.
- Mauna, Boer. (2005). Hukum Internasional pengertian, peranan dan fungsi dalam Era dinamika global. *Bandung :PT. ALUMNI*
- Mudric, Miso. (2016). Maritime Security: Editorial Note. CIRR. *Jurnal Online Edition*
- McGlinchey, Stephen, Walters, Rosie, Scheinpflug, C. (2017). International Relation Theory. In *E-International Relations.* <https://doi.org/10.5848/csp.2823.00001>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta (ed.)).
- Stokke, Olav Schram. (2007). *Determining the Effectiveness of International Regimes.*
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). *Yogyakarta : Deepublish.*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D .* Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan

Operasionalnya. In *Akademia Pustaka*.

Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2020). Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. In Melvana Publishing (Issue 8).

Underdal, Arild. Explaining Regime Effectiveness. University of Oslo.

Jurnal dan Skripsi

Anggraini, S., Dian Kusumawardhana, I., & Ramadhan, I. (2018). The Implication of Indonesia's IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72130>

Atmaja, S. B., & Nugroho, D. (2017). Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 3(2), 101. <https://doi.org/10.15578/jkpi.3.2.2011.101-113>

Bueger, C. (2015). "What is Maritime Security". *Jurnal Maritime*, Vol.1. NO.1. Januari.

Claudiya Radekna Salfauz. (2015). Efektivitas Code Of Conduct For Responsible di Samudera Hindia. Studi Kasus Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Menanggulangi IUU. *Journal Internasional Relations*. Vol 1, Nomor 2.

Dicky Adriansyah, (2019). Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Keamanan Non Tradisional Studi Kasus : *Illegal Fisihing* Periode Tahun 2015-2016. Repository Veteran Jakarta. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Marni. (2020). Tinjauan Penerapan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) Pada Alat Tangkap Sero dan Bagan Perahu di Perairan Tondonggeu, Kendari. *Jurnal SAINS dan INOVASI Perikanan*. Vol. 4 No. 2

A. Chaliluddin, M., dkk. (2019). Identifikasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbasis CCRF di Kabupaten Pidie, Aceh. *Jurnal Galung Tropika*, Vol. 8 No. 3.

Nafiatin R., (2019). Efektivitas Regional Plan Of Action Terhadap Upaya Pencegahan Illegal Unregulated Unreported Fishing di wilayah Perairan Indonesia. Program Studi Hubungan Internasional. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Sagena, U. W. (2013). Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor. *Jurnal Hubungan Internasional*, 72–91.

Siregar, P. N., Sudarsono, B., & Sabri, L. (2020). Analisis Hubungan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Kepulauan Riau Dengan Batas Maritim Negara Indonesia Menggunakan Citra Sentinel-1a. *Jurnal Geodesi Undip*, 10 (1), 95–104. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/29629>

- Trihartono, A. Indriastuti, S., & Nisya, C. (2020). Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. In Melvana publishing (Issue 8). <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel> 4 Agus Tri. Pdf.
- Tyas Dita Pramesthy. (2019). Analisis Alat Penangkap Ikan Berdasarkan Kode etik Tatalaksana Perikanan Bertanggung Jawab di Perairan Dumai. Jurnal Perikanan dan Kelautan. Vol. 1 No, 2 Tahun 2020.

URL dan Website

- Clara Eroukhmanoff, 2018. "Securitisasi Theory: An Introduction" melalui <https://www.eir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/> pada 24 April 2023.
- KKP. 2018. *Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan*. <https://kkp.go.id/artikel/1495-faq-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-psdkp>. Diakses pada 08 Juli 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Luas Wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Riau melalui: <http://kepri.bps.go.id/indicator/153/238/1/luas-daratan-provinsi-kepulauan-riau-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2023.
- KKP. 2018. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. <http://kkp.go.id/artikel/1495-faq-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-psdkp>. Diakses pada 21 Mei 2023.

Undang-Undang dan Peraturan

- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009). Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).